

## **KEBIJAKAN PENGGUNAAN PEMETAAN SOSIAL UNTUK MENGUBAH KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH MENJADI KAWASAN WISATA DI INDONESIA TIMUR**

**Rulinawaty<sup>1</sup>, Joko Tri Brata<sup>2</sup>, Abdul Rahman<sup>3</sup>, Andi Wijaya<sup>4</sup>, Rahmat Hidayat<sup>1</sup>**

Universitas Terbuka<sup>1</sup>

Universitas Sulawesi Tenggara<sup>2</sup>

Politeknik STIA LAN Bandung<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Lampung<sup>4</sup>

rulinawaty990@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pemetaan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan daerah kumuh melalui strategi transformasi kawasan menjadi zona wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meta-analisis, yang memungkinkan integrasi hasil dari berbagai studi sebelumnya guna mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan daerah kumuh. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis dalam berbagai database akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, dengan kriteria inklusi yang mencakup relevansi topik, kejelasan metodologi, dan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan sosial berperan penting dalam menciptakan model intervensi yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas permukiman. Kolaborasi lintas lembaga, baik antara pemerintah, LSM, maupun komunitas lokal, menjadi faktor utama dalam memastikan keberhasilan program intervensi. Jaringan organisasi yang terlibat menunjukkan adanya integrasi vertikal dan horizontal yang memperkuat koordinasi antar-sektor dan lapisan tata kelola, meskipun tantangan seperti kurangnya koordinasi dan ego sektoral masih menjadi hambatan utama. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya integrasi kebijakan dan peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan, pendidikan, serta transfer pengetahuan guna memperkuat institusi dan masyarakat. Simpulan, bahwa pendekatan pemetaan sosial yang komprehensif dapat secara efektif mengatasi kemiskinan serta mengelola daerah kumuh secara berkelanjutan. Transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur fisik tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemetaan Sosial, Transformasi Perkotaan, Keterlibatan Masyarakat, Kebijakan Publik, Jaringan Kebijakan

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of the social mapping approach in poverty alleviation and slum management through a strategy of transforming areas into tourist zones. The method used in this study is meta-analysis, which allows the integration of results from various previous studies to evaluate factors that contribute to the success and challenges in slum management. Data were collected through a systematic search in various academic databases, scientific journals, and research reports, with inclusion criteria that include topic relevance, methodological clarity, and data quality. The results show that social mapping plays an important role in creating a more effective intervention model to alleviate poverty and improve the quality of settlements. Collaboration across institutions, both between governments, NGOs, and local communities, is a major factor in ensuring the success of the intervention program. The network of organizations involved shows vertical and horizontal integration that strengthens coordination between sectors and layers of governance, although challenges such as lack of coordination and sectoral egos are still major obstacles. In addition, this study highlights the importance of policy integration and local capacity building through training, education, and knowledge transfer to strengthen institutions and communities. The conclusion is that a comprehensive social*

*mapping approach can effectively address poverty and manage slums sustainably. The transformation of slum areas into tourist destinations not only has an impact on improving physical infrastructure but also encourages economic growth and social welfare of the community.*

**Keywords:** *Social Mapping, Urban Transformation, Community Engagement, Public Policy, Policy Networks*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, terutama di wilayah timur, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi kompleksitas daerah kumuh. Daerah-daerah ini mencerminkan kesenjangan yang mencolok baik dalam hal ekonomi maupun infrastruktur. Pendekatan tradisional terhadap pembangunan sering terjebak dalam paradigma peningkatan infrastruktur fisik, mengabaikan faktor sosial-ekonomi yang memainkan peran penting dalam dinamika daerah kumuh. Untuk mengatasi hal ini secara efektif, diperlukan pendekatan inovatif yang dapat mengubah daerah kumuh menjadi daerah yang tidak hanya layak huni tetapi juga kompetitif secara ekonomi. Kunci strategis yang menjanjikan adalah penggunaan pemetaan sosial sebagai landasan untuk merencanakan transformasi daerah kumuh menjadi tujuan yang menarik (Kuffer et al. 2016).

Pemetaan sosial adalah metodologi untuk analisis data spasial yang berfokus pada aspek sosial dalam suatu komunitas, memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di daerah kumuh (Williams et al., 2020). Dengan memahami struktur sosial, jaringan relasional, dan sumber daya yang tersedia, kita dapat merancang intervensi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan penduduk setempat tetapi juga melibatkan mereka secara langsung dalam proses perencanaan. Pendekatan ini tidak hanya membawa perubahan baru dalam praktik pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, kolaborasi potensial, dan sumber daya penting untuk mengubah daerah kumuh menjadi magnet pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, mengubah daerah kumuh menjadi tujuan wisata lebih dari sekadar upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi baru. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah dan nasional untuk mengeksplorasi dan mengkomersialkan warisan budaya unik dan aset masyarakat yang ditemukan di daerah ini (Zain et al., 2018). Dengan strategi ini, kita dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sekaligus secara signifikan meningkatkan status sosial-ekonomi kawasan. Pendekatan holistik terhadap pembangunan perkotaan menekankan aspek partisipatif, berpotensi menjadi kunci untuk membuka data dan informasi langsung dari jiwa masyarakat mengenai aset, sumber daya, kebutuhan, dan berbagai tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk memvisualisasikan permasalahan, tetapi juga untuk mengeksplorasi peluang pengembangan potensial, termasuk di bidang pariwisata. Mengubah daerah kumuh menjadi tujuan wisata tidak hanya mengubah narasi dari stigma negatif menjadi positif, tetapi juga membuka babak baru peluang ekonomi bagi masyarakat lokal (Horne, 2022). Dalam konteks ini, mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata menjanjikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan pariwisata untuk mengantisipasi dan menanggapi dampak perubahan iklim dan berbagai tantangan pengelolaan pariwisata.

Transformasi daerah kumuh menjadi destinasi wisata di Indonesia Timur melibatkan berbagai aspek implementasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh perkotaan, kebijakan perlu difokuskan pada mata pencaharian berkelanjutan (Syariah, 2017), perspektif pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin (Kiptiah, 2016), pertimbangan hukum pemanfaatan kawasan konservasi untuk ekowisata (Pertiwi, et al., 2019), dan sosialisasi kebijakan pengembangan kawasan wisata (Djani, 2023). Selain itu, kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam melindungi sumber daya alam seperti danau dan mengelola wilayah sekitarnya (Permatasari, et al., 2022). Oleh karena itu, metode pemetaan sosial cocok untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks transformasi daerah kumuh menjadi tempat wisata, penting untuk mempertimbangkan partisipasi masyarakat, peraturan pemerintah, dan kualitas lingkungan (Suryani, 2019). Mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan kumuh dapat membantu mempertahankan desain yang ada, meningkatkan ruang komunal, dan mengedukasi warga dalam mengelola desa ramah wisata (Irwan, 2023). Selain itu, integrasi kebijakan pemetaan sosial dapat membantu pemanfaatan wilayah pesisir yang tepat untuk keperluan pariwisata (Musda, 2023). Untuk memastikan keberhasilan transformasi kawasan kumuh menjadi tujuan wisata, sangat penting untuk mengevaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata (Abadi, 2018), mengintegrasikan wisata desa, mengoptimalkan peta rute pariwisata, dan meningkatkan penanggulangan bencana di wilayah pesisir (Endah, 2023). Selain itu, memanfaatkan metode pemetaan sosial dapat memfasilitasi revitalisasi daerah untuk pariwisata, mempromosikan budaya lokal dan praktik berkelanjutan (Budiman, et al., 2023).

Keterlibatan masyarakat melalui pemetaan sosial memungkinkan pengungkapan potensi pariwisata daerah yang kurang dieksplorasi, seperti keindahan alam, budaya, dan nilai sejarah (Arbogast, 2020). Melalui proses pemetaan partisipatif, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai objek tetapi juga bertransformasi menjadi subjek aktif dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pariwisata lokal, sehingga menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, dengan menerapkan pendekatan partisipatif seperti pemetaan partisipatif berbasis web, masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi aktif dalam pengumpulan data spasial dan membangun pengetahuan spasial yang penting untuk perencanaan tingkat lokal, termasuk dalam kondisi yang menantang seperti permukiman informal. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan meningkatkan akurasi dan relevansi informasi dengan kebutuhan lokal, membuka jalan bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Falco et al., 2019). Dengan demikian, melalui pendekatan partisipatif dalam pemetaan sosial, identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan potensi pariwisata lokal secara optimal dapat direalisasikan, menjanjikan manfaat ekonomi yang substansial bagi masyarakat lokal dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya (Burdon et al., 2019).

Indonesia Timur, dengan kekayaan budaya dan alamnya, menawarkan peluang unik untuk mengembangkan kawasan wisata dari zona kumuh. Namun, tantangan seperti kepemilikan lahan, akses ke sumber daya, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar pemangku kepentingan harus dikelola dengan hati-hati. Hal ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan inklusif, di mana pemetaan sosial dapat menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengenali potensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemetaan sosial dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan transformasi kawasan kumuh menjadi kawasan wisata di Indonesia Timur. Melalui pendekatan meta-analitis, artikel ini mengulas berbagai studi dan proyek yang sebelumnya telah menggunakan konsep pemetaan sosial dalam prosesnya. Dengan demikian, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses transformasi ini. Oleh karena itu, artikel ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemanfaatan pemetaan sosial dalam menangani daerah kumuh menjadi kota wisata.

## **METODE PENELITIAN**

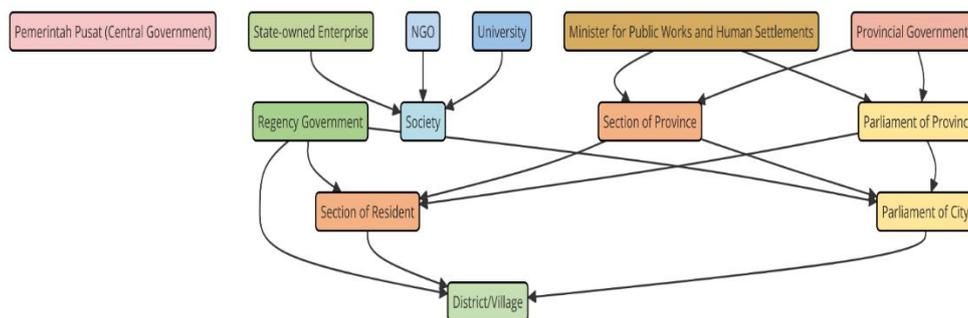
Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis, pendekatan sistematis yang digunakan dalam penelitian untuk mengintegrasikan hasil dari penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan ilmiah yang ada (Goodman et al., 2015). Dalam konteks mengubah daerah kumuh menjadi zona wisata, meta-analisis dipilih karena kemampuannya untuk memberikan wawasan yang komprehensif melalui analisis agregat dari berbagai penelitian, yang pada akhirnya memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam proses ini

(Zeggini & Ioannidis, 2009). Data untuk meta-analisis ini dikumpulkan melalui pencarian sistematis di berbagai database akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian tentang penggunaan pemetaan sosial dan pengembangan pariwisata di daerah kumuh (Scofield et al., 2017). Kriteria inklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya studi yang relevan yang memenuhi standar kualitas tertentu yang dianalisis. Kriteria ini termasuk relevansi topik, metodologi yang jelas, dan kesesuaian data. Proses penyaringan kemudian dilakukan untuk memilih studi yang paling selaras dengan fokus penelitian ini (Paul & Barari, 2022).

Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama, pola, dan hubungan antar variabel dalam literatur yang ada. Pendekatan ini melibatkan pembuatan matriks analisis untuk mengatur data secara tematik dan memfasilitasi identifikasi tren dan kesenjangan dalam penelitian. Analisis ini juga mencakup evaluasi kualitatif terhadap metodologi dan temuan dari studi yang disertakan untuk memahami konteks dan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi interpretasi hasil (Basu, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil meta-analisis, temuan penggunaan pemetaan sosial umumnya menunjukkan keberhasilan. Beberapa artikel yang diulas membahas pengentasan kemiskinan melalui program intervensi kumuh di Indonesia Timur, dengan fokus pada pengembangan model inovatif untuk pengentasan kemiskinan. Model-model ini melibatkan penerapan model kelembagaan dan integrasi peningkatan kualitas program yang bertujuan untuk mencegah dan mengelola daerah kumuh secara efektif. Analisis menunjukkan bahwa manajemen kumuh yang efektif membutuhkan kolaborasi lintas lembaga yang kuat, seperti yang dijelaskan dalam artikel. Ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas lokal yang bekerja sama berdasarkan prinsip partisipasi, komunikasi, saling percaya, dan berbagi sumber daya.



**Gambar 1:** Model Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan

Pendekatan ini membantu menyinkronkan kebijakan di berbagai tingkatan, memastikan upaya yang terintegrasi dan lebih berdampak. Jaringan organisasi yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kendari menunjukkan integrasi vertikal dan horizontal. Jaringan ini sangat penting untuk mengoordinasikan upaya di berbagai sektor dan lapisan tata kelola, yang membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan implementasi kebijakan. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi dan ego sektoral terkadang menghambat efektivitas jaringan ini. Tantangan umum di antara studi tersebut termasuk kurangnya pengetahuan teknis, komunikasi yang tidak memadai, dan berbagai data tentang tingkat kemiskinan.

Tantangan-tantangan tersebut mempengaruhi kualitas dan akurasi capaian sasaran dalam program permukiman kumuh dan pengentasan kemiskinan. Artikel yang mengkaji penggunaan kolektif pemetaan sosial menekankan pentingnya mengintegrasikan upaya melalui jaringan yang terkoordinasi dengan baik dan kolaborasi antar-lembaga untuk pengelolaan kumuh dan pengentasan kemiskinan yang efektif. Integrasi ini memungkinkan pengumpulan sumber daya,

berbagi keahlian, dan menyelaraskan tujuan di antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi. Terlepas dari pendekatan inovatif dan kolaboratif, tantangan seperti perbedaan data dan komunikasi yang kurang optimal tetap ada. Mengatasi masalah ini membutuhkan peningkatan mekanisme pengumpulan dan berbagi data, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan terus mengadaptasi dan menyempurnakan strategi intervensi berdasarkan realitas lapangan dan umpan balik. Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kerangka kerja kelembagaan yang kuat, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, dan memastikan bahwa intervensi dapat disesuaikan dengan konteks lokal, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi dan lembaga lokal untuk mengelola dan menerapkan program pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.



**Gambar 2.** Urutan Proses Pengentasan Kemiskinan

Efektivitas program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi dan sinergi di antara berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan meningkatkan pendekatan yang ada. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan komitmen yang kuat dari semua tingkat pemerintahan serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang inklusif dan transparan di antara lembaga-lembaga ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang muncul dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Selain itu, peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer pengetahuan merupakan langkah penting dalam memperkuat institusi dan masyarakat. Dengan cara ini, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dan intervensi tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memiliki dampak jangka panjang. Melalui pendekatan ini, pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dengan pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Menghadapi tantangan global dan lokal, kebijakan harus responsif dan fleksibel, mengakomodasi perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta memanfaatkan teknologi dan inovasi. Dengan cara ini, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih dinamis dan mampu mengatasi berbagai situasi yang berkembang. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi adalah kunci untuk menciptakan program yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan, membawa perubahan positif pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara holistik.

## SIMPULAN

Studi meta-analisis menunjukkan bahwa analisis kolektif dari beberapa artikel menunjukkan bahwa pendekatan pemetaan sosial yang komprehensif dapat secara efektif mengatasi kemiskinan dan mengelola daerah kumuh di Indonesia Timur. Kemajuan yang terlihat dari pendekatan kolaboratif dan jaringan seperti itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya di bagian hasil dan diskusi, sangat signifikan. Artikel ini menekankan efektivitas pemetaan sosial dalam memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial masyarakat, yang pada gilirannya membantu dalam merancang strategi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif bagi penduduk setempat. Potensi transformatif mengubah daerah kumuh menjadi tempat wisata disorot sebagai strategi yang lebih dari sekadar meningkatkan infrastruktur fisik untuk mencakup peningkatan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan perkotaan yang lebih luas dengan memfasilitasi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan meningkatkan standar hidup. Dengan mengintegrasikan masyarakat melalui pemetaan partisipatif, warga tidak hanya menjadi subjek dalam proses pembangunan, tetapi juga peserta aktif yang wawasan dan kerjasamanya sangat penting untuk keberhasilan inisiatif ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, M. F. (2018). Interaksi komponen sustainable livelihood memengaruhi pilihan penggunaan air bersih pada komunitas urban di kawasan permukiman kumuh. *Bali Medika Jurnal*, 5(1), 136-143. <https://doi.org/10.36376/bmj.v5i1.29>
- Arbogast, D., Butler, PM, Faulkes, E., Eades, DC, Deng, J., Maumbe, K., ... & Smaldone, D. (2020). Menggunakan desain sosial untuk memvisualisasikan hasil perencanaan pariwisata berkelanjutan: pendekatan multifase dan transdisipliner. *Jurnal Internasional Manajemen Perhotelan Kontemporer*, 32(4), 1413-1448.
- Basu, A. (2017). Cara melakukan meta-analisis: tutorial dasar. *Lingkungan. Ecol.*, vol. 9, no. 2, hlm. 35–42, 2018
- Budiman, A. and Tjandra, A. H. (2023). Penerapan metode transprogramming & arsitektur ekologi dalam perancangan sentra kerajinan & kuliner umkm semper timur. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, P*
- Burdon, D., Potts, T., McKinley, E., Lew, SY, Shilland, R., Gormley, K., ... & Forster, RM (2019). Memperluas peran pemetaan partisipatif untuk menilai penyediaan jasa ekosistem di lingkungan pesisir setempat. *Layanan Ekosistem*, 39, 101009.
- Djani, W., Kase, P., Long, B., & Jehamat, L. (2023). Sosialisasi kebijakan pengembangan agrowisata kopi di desa colol kecamatan lamba leda kabupaten manggarai timur ntt. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(5), 1527-1536.
- Falco, E., Zambrano-Verratti, J., & Kleinhans, R. (2019). Pemetaan partisipatif berbasis web di permukiman informal: daerah kumuh Caracas, Venezuela. *Habitat Internasional*, 94, 102038.
- Goodman, JE, Boyce, CP, Sax, SN, Beyer, LA, & Prueitt, RL (2015). Memikirkan kembali meta-analisis: aplikasi untuk data polusi udara dan seterusnya. *Analisis Risiko*, 35(6), 1017-1039.
- Horne, L., DiMatteo-LePape, A., Wolf-Gonzalez, G., Briones, V., Soucy, A., & Urioste-Stone, S. D. (2022). Perencanaan perubahan iklim di destinasi wisata pesisir, pendekatan partisipatif. *Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, 23(4), 549-563.
- Irwan, M. F. M., Muhibuddin, A., & Saleh, H. (2023). Evaluasi partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(1), 90-93.
- J. T. Brata, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Permukiman Kumuh di Kota Kendari, Indonesia," J.

- Katik Rajo Endah, M. I., Mubarak, F., Syafganti, I., & Syah, F. (2023). Integrasi desa wisata melalui optimalisasi peta rute wisata sebagai konten pemasaran pariwisata. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 14(1), 12-24.
- Kiptiah, M. (2016). Pengembangan wilayah dalam perspektif potensi sumber daya. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 1(1), 24-32. <https://doi.org/10.34128/jht.v1i1.12>
- Kuffer, M., Pfeffer, K., & Sliuzas, R. (2016). Daerah kumuh dari luar angkasa—15 tahun pemetaan permukiman kumuh menggunakan penginderaan jauh. *Penginderaan Jauh*, 8(6), 455.
- Musda, G. H., Ikhsan, A. M., & Wahyuni, A. (2023). Strategi penataan ruang terbuka publik tepi pantai berbasis disaster management di kawasan megamas kota manado. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 17(2), 183-195. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v17i2.36127>
- Paul, J. dan Barari, M. (2022). Meta-analisis dan tinjauan literatur sistematis tradisional—apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana?. *Psikologi & Pemasaran*, 39(6), 1099-1115.
- Permatasari, P. A. and Koestoer, R. A. (2022). Pengelolaan sempadan danau di kawasan pertanian: ulasan bandingan polandia, tiongkok dan indonesia. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 139-158. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.3.139-158>
- Pertiwi, A. D. and Cahyana, I. N. (2019). Tinjauan yuridis penggunaan kawasan cagar alam sebagai ekowisata berdasarkan undang – undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (studi pada pulau sempu kabupaten malang). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
- Scofield, JE, Buchanan, EM, & Kostic, B. (2017). Sebuah meta-analisis tentang keuntungan pemrosesan kelangsungan hidup dalam memori. *Buletin Psikonomi & Tinjauan*, 25(3), 997-1012.
- Suryani, A. S. (2019). Pengaruh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir benoa badung bali. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 171-187.
- Syariah, A. (2017). Analisis daya dukung lahan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis ekowisata. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 2(2), 86-93.
- Williams, TK, Wei, T., & Zhu, X. (2020). Pemetaan pemukiman kumuh perkotaan menggunakan citra beresolusi sangat tinggi dan data batas tanah. *Jurnal IEEE tentang Topik Terpilih dalam Pengamatan Bumi Terapan dan Pengintaian Jauh*, 13, 166-177. <https://doi.org/10.1109/jstars.2019.2954407>
- Zeggini, E. dan Ioannidis, JPA (2009). Meta-analisis dalam studi asosiasi genom. *Farmakogenomik*, 10(2), 191-201.